



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANANG FAKHRUDIN**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, KERJASAMA DAN ALUMNI**
3. NHK : **812555**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.665.000.000**

1. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 780.000.000
2. Tanah Seluas 696 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000
5. Tanah Seluas 278 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000
6. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
7. Tanah Seluas 353 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **102.700.000**

1. MOTOR, HONDA NC1100 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000
2. MOTOR, HONDA X1B02N04LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, CHEVROLET SPIN 1.3LTZM/T Tahun 2013, HASIL



SENDIRI Rp. 77.000.000

4. MOTOR, HONDA : F1C02N46L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 156.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 759.179.356**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.682.879.356**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.682.879.356

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.